

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SIREKAP PADA PEMILU 2024

Rantian Wigita¹, Erinda Alfiani Fauzi², Murniyati Yanur³

rantianwigitaa@gmail.com¹, erindafauzi@fisip.upr.ac.id², murniyatyanur@fisi.upr.ac.id³

Universitas Palangka Raya

ABSTRAK

Dalam mewujudkan asas terbuka dan akuntabel dalam pemilu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi untuk perhitungan suara pemilu berbasis elektronik. KPU sebagai penyelenggara berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 akan menggunakan Sistem Rekapitulasi Elektronik atau disingkat dengan Sirekap. Sirekap adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mempublikasikan hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi pemilu. Selain itu aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi pemilu serentak yang menggunakan alat bantu bernama sirekap pada pemilu yang menjadi pemilu serentak perdana antara pemilu. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Ini akan diuraikan secara deskriptif Kualitatif diaman terdapat realitas sosial terhadap sirekap sebagai kebijakan pemilu 2024. Ini menunjukkan sirekap ini sendiri mempunyai tantangan dan potensi kekeliruan dalam pelaksanaannya yaitu seperti adanya serangan siber hingga kondisi yang error terhadap website yang digunakan oleh KPU menjadi rentan, kekeliruan penginputan data dalam akses sirekap yang dilakukan oleh anggota KPPS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari potensi penggunaan sirekap dalam pemilu 2024.

Kata Kunci : Tantangan, Potensi, Pemilu, Sirekap.

ABSTRACT

is utilized for electronic-based election vote counting. The KPU as the organizer based on KPU Decree Number 66 of 2024 will use the Electronic Recapitulation System or abbreviated as Sirekap. Sirekap is an information technology-based application that is used to publish the results of vote counting and the election recapitulation process. Apart from that, this application also functions as a tool in carrying out simultaneous election recapitulation using a tool called sirekap in elections which are the first simultaneous elections between elections. This application also functions as a tool in carrying out the recapitulation of vote counting results. This will be described in a qualitative descriptive manner, where there is a social reality regarding Sirekap as a policy for the 2024 election. This shows that Sirekap itself has challenges and potential errors in its implementation, namely, such as cyber attacks, error conditions on the website used by KPU which becomes vulnerable, errors in data input. access to sirekap carried out by KPPS members is an inseparable part of the potential use of sirekap in the 2024 elections.

Keywords: Challenges, Potential, Elections, Sirekap.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan momen penting dalam setiap negara demokratis, di mana rakyat berhak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga legislatif atau kepala eksekutif. Di Indonesia, pemilihan umum diselenggarakan secara berkala sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pemilihan Umum 2024 menjadi sorotan utama di tengah masyarakat Kalimantan Tengah, wilayah yang kaya akan keberagaman budaya, sumber daya alam, dan potensi pembangunan. Sebagai salah satu provinsi yang membentang luas di Pulau Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki peran strategis dalam proses demokrasi Indonesia. Di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berkembang, Pemilihan Umum 2024 di Kalimantan Tengah menjadi momentum yang sangat dinanti untuk menentukan arah dan masa depan provinsi ini.

Salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam Pemilihan Umum 2024 adalah

Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap). Sirekap pemilu merupakan sistem penghitungan dan pelaporan hasil suara yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. yang tepat dan efisien dari Sirekap menjadi kunci dalam memastikan keabsahan dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Dalam konteks Kalimantan Tengah, Sirekap pemilu menjadi sorotan utama mengingat peran pentingnya dalam menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi. Melalui Sirekap, diharapkan seluruh tahapan pemilu dapat dilaksanakan dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti, sehingga masyarakat dapat memilih wakil-wakilnya secara bebas dan adil.

Pelaksanaan pemilu serentak menggunakan sistem informasi rekapitulasi SIREKAP (zamasari A. Et. Al., 2021). Dalam pengamatan di Kalimantan Tengah ditemukan bahwa ada berbagai permasalahan umum yang terjadi dalam aplikasi sirekap. Antara lain bahwa belum semua wilayah memiliki akses yang sama terkait jaringan internet atau Listrik, masih banyak wilayah yang punya blank spot area. Kendala yang selanjutnya adalah belum semua petugas memiliki kemampuan dalam mengelola aplikasi atau smartphone (Hendro C. Daud M. Liando dan Triecke E. Tulung, 2022)

Dengan demikian, pendahuluan ini akan membahas secara lebih mendalam tentang efektivitas dari Sirekap Pemilu 2024 di Kalimantan Tengah, menggali tantangan, peluang, dan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjamin kelancaran dan keberhasilan proses demokrasi di tingkat lokal.

METODE

Maka peneliti ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji data secara sekunder. Penelitian jenis ini dikenal juga dengan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif yang digunakan sepsifik ialah deskriptif kualitatif dimana terdapat realitas sosial tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya dengan cara objektif dan empiris, tetapi juga melalui interpretasi dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam fenomena tersebut (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi tentang penerapan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) dalam konteks Pemilihan Umum 2024 di Kalimantan Tengah menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pemilu. (Sujatmiko, B., & Nurfatwa, F. 2023). Melalui Sirekap, proses pengumpulan dan pengolahan data suara dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga meminimalkan potensi kesalahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan. Implementasi Sirekap juga memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kecepatan penyampaian hasil pemilu kepada masyarakat, sehingga mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keadilan dalam proses demokrasi. (Wiratmaja, A. P., & Indra, D. S. 2024).

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam penerapan Sirekap. Infrastruktur teknologi dan konektivitas internet di beberapa daerah terutama daerah Kalimantan Tengah sendiri masih belum memadai, yang dapat memperlambat proses rekapitulasi suara. Selain itu, diperlukan peningkatan keterampilan dan pemahaman tenaga pengelola pemilu terkait pengoperasian Sirekap, serta perlindungan yang lebih baik terhadap keamanan data dan privasi pemilih. (Wiratmaja, A. P., & Indra, D. S. 2024).

Selain itu pencapaian tujuan yaitu keseluruhan dari yang menyangkut upaya dalam pencapaian tujuan yang harus dilihat sebagai bentuk suatu proses. Terkait aspek pencapaian tujuan dengan apa yang diuraikan di atas yang kemudian dikombinasikan dengan hasil observasi selama di lapangan, diketahui bahwa aplikasi Sipol sangat

membantu kerja-kerja KPU dalam melaksanakan sejumlah tahapan penyelenggaraan Pemilu, diantaranya verifikasi faktual partai politik. Begitu pun partai politik juga dapat mengoperasikan sistem ini kapan saja dan dimana saja, dan dapat mengelola data secara internal bersama-sama dengan kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta partai politik dapat melakukan pengecekan dan perbaikan data yang sudah dimasukkan ke server sebelum dilakukan verifikasi. Dengan tersedianya aplikasi ini, maka memudahkan KPU maupun partai politik, dan akan menimbulkan berjalannya keefektifan dalam menyelenggarakan Pemilu. Dimana menunjukkan bahwa pencapaian tujuan mengenai aplikasi Sipol yang merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menginput data partai politik seperti profil, kepengurusan, domisili

1. Aplikasi Rekapitulasi SIREKAP

Aplikasi Sirekap pertama kali diumumkan pada tanggal 18 Februari 2021 oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Indonesia. Harapan pada aplikasi tersebut adalah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pemilihan umum serta memudahkan akses informasi bagi masyarakat terkait dengan pemilu.



Gambar 1. Aplikasi Sirekap kpu

Setelah membuka aplikasi sirekap kpu, pengguna akan diarahkan masuk dengan akses sidik jari pengguna tersebut, dan pengguna akan diarahkan ke berbagai menu diantaranya : Kelola Daftar Hadir, Kelola Tanda Terima & Kejadian Khusus, dan Waktu pemungutan Suara. Selanjutnya untuk menu Kelola daftar hadir dan Kelola tanda terima & kejadian khusus pengguna diarahkan klik dan mengisi menu-menu tersebut dengan dokumen yang sesuai dan sudah ditetapkan. Untuk menu waktu pemungutan suara di isi Ketika mulai nya waktu pemungutan suara hingga selesainya kegiatan penghitungan suara.



Gambar 2. Menu Kelola daftar Hadir, Kelola Tanda Terima & Kejadian Khusus dan waktu

Pemungutan Suara

Sumber : dokumentas pribadi,2024

Setelah selesai mengisi menu diatas, pengguna diarahkan untuk memotret dokumen C. hasil pada jenis pemilu yang sudah tersedia, dimulai dari pilpres, pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

The image displays five screenshots of the 'siRekap Pemilu' application interface, organized into two rows. Each screenshot shows a header with 'KATINGAN' and 'KALIMANTAN TENGAH' and a main menu with three options: 'KELOLA DAFTAR HADIR', 'KELOLA TANDA TERIMA & KEJADIAN KHUSUS', and 'WAKTU PEMUNGUTAN SUARA'. Below the menu are three panels for election results, each with a progress bar and management buttons.

Panel	Belum Difoto	Terfoto	Terverifikasi
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	0	3	0
Pemilihan DPR	0	19	1
Pemilihan DPD KALIMANTAN TENGAH	0	0	3
Pemilihan DPRD Provinsi KALIMANTAN TENGAH 1	0	20	0
Pemilihan DPRD Kabko KATINGAN 3	0	20	0

Gambar 3. Formulir C hasil PILPRES, PILEG DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Sumber : dokumentasi pribadi,2024

2. Efektivitas aplikasi Sirekap

Analisis ini dilakukan dengan mengambil dari penelitian lain sebagai studi literature yang memiliki nilai dan aspek yang cukup sama dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Penelitian terdahulu dengan judul Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (SIREKAP) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu (2024) karena memiliki masalah yang cukup serupa dengan penelitian Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Pada Pemilu 2024. Terdapat 3 indikator yaitu: Sosialisasi Program, Tujuan

Program, pemantauan program, serta Kendala dan Kelemahan Program.

1) Sosialisasi Program

Penyelenggara program diharapkan mampu melaksanakan sosialisasi program untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program tersebut. Dalam hal ini komisi pemilihan umum telah melaksanakan sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi/platform online yang dapat dan mudah diakses semua kalangan seperti youtube yang dibuat oleh tim KPU RI.



Gambar 4. Sosialisasi penggunaan Program SIREKAP
Sumber :yt. kpu.go.id,2024

Selanjutnya KPU RI menerbitkan berita tentang sosialisasi pengenalan sirekap pemilu 2024 di website berita guna memberikan informasi kepada Masyarakat.



Gambar 5. Laman berita sosialisasi aplikasi sirekap
Sumber :Website resmi kpu.go.id,2024

2) Tujuan Program

Diciptakan nya aplikasi sirekap ini sendiri Secara keseluruhan, tujuan utama dari aplikasi Sirekap adalah untuk memudahkan dan mempercepat proses pengumpulan, pengolahan, dan rekapitulasi data dalam berbagai kegiatan, terutama yang melibatkan proses penghitungan suara atau pengumpulan informasi lainnya yang memerlukan analisis data yang akurat. Ini bertujuan lain untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan keamanan dalam proses penghitungan suara serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas hasil pemilihan.

3) Pemantauan Program

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan beberapa langkah untuk memantau program aplikasi Sirekap:

1. Pengawasan Internal: KPU dapat menetapkan tim khusus atau unit internal yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan aplikasi Sirekap. Tim ini dapat melakukan pemantauan langsung terhadap operasi aplikasi, memeriksa laporan, dan menangani masalah yang muncul.
2. Pengujian dan Evaluasi: Sebelum pemilihan umum, KPU biasanya melakukan pengujian dan evaluasi menyeluruh terhadap aplikasi Sirekap. Ini termasuk pengujian fungsionalitas, keamanan, dan kinerja aplikasi untuk memastikan bahwa itu beroperasi sebagaimana diharapkan.
3. Pelatihan: KPU juga dapat menyediakan pelatihan kepada petugas pemilihan dan staf terkait tentang cara menggunakan aplikasi Sirekap dengan benar dan efisien. Hal ini membantu memastikan bahwa aplikasi digunakan secara optimal selama proses pemilihan.

Setelah pemilihan selesai, KPU dapat melakukan audit pasca-pemilihan terhadap aplikasi Sirekap untuk mengevaluasi kinerjanya dan mengidentifikasi area perbaikan untuk pemilihan selanjutnya. Langkah-langkah ini membantu KPU memastikan bahwa aplikasi Sirekap beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penghitungan suara selama pemilihan umum.

4) Kendala dan Kelemahan Program

Sirekap menjadi buah bibir dalam konteks negatif imbas banyak kesalahan input data formulir C1 dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Permasalahan utama adalah terkait teknis penerapan Sirekap di petugas KPPS di daerah pelaksanaan Pilkada. Banyak daerah yang masih belum mempunyai akses internet. Dan menurut pengalaman dari para petugas yang mengakses sirekap terutama saya sendiri kendala lain yang dialami adalah terjadi system sirekap error karena terlalu banyak yang mengakses sehingga kendala tersebut membuat keterlambatan dalam proses rekapitulasi data

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan SIREKAP pada pemilu 2024 adalah bahwa sistem tersebut telah membantu dalam meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam proses pemilu.

Penggunaan SIREKAP memungkinkan penghitungan suara menjadi lebih cepat dan akurat, mengurangi kemungkinan kecurangan, serta memberikan akses yang lebih mudah bagi pemilih untuk memantau hasil pemilu secara real-time. Meskipun mungkin tidak dipungkiri masih banyak kekurangan yang harus dievaluasi lebih lanjut dan ada beberapa tantangan dan penyesuaian yang diperlukan, secara keseluruhan, penggunaan SIREKAP telah membawa dampak positif dalam pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Pradesa, Ica Angger. "ANALISIS PENGGUNAAN SISTEM REKAPITULASI SUARA (SIREKAP) DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA PEMILU 2024." Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 3.4 (2024): 47-57.

Fauziah, Azkiyah Rahmita, et al. "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." Jurnal Kajian Konstitusi 3.1 (2023): 51-75.

Hidayat, Fadlan Iman. Efektivitas Organisasi dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2022.

Wulandari, Mita Suci. PENERAPAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP)

- UNTUK MENDORONG PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 YANG LEBIH BERINTEGRITAS. Diss. Master Program In Political Science, 2023.
- Hadyatama, Fachrel. "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sirekap Dalam Pengiriman Hasil Perhitungan Suara Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat." *Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment* 2.3 (2022): 275-281.
- Chaverlin, Hendro, Daud M. Liando, and Trilke E. Tulung. "Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020." *GOVERNANCE* 2.1 (2022).
- Gauru, Christiana Cristin, Rina Martini, and Laila Kholid Alfirdaus. "Implementasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang." *REFORMASI* 12.2 (2022): 224-230.
- PAKAMASE, OKTARI. ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KOTA DUMAI. Diss. UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2022.
- Fazira, Wan. Dampak Aplikasi Sirekap Dalam Pilkada 2020 Kota Tanjungbalai. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
- Nurkamiden, Mario. "SiRekap: Tantangan dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak di Indonesia." *SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.2 (2024): 101-110.
- Intakhiya, D. M., Santoso, U. P., Mutiarin, D. 2021. "Strategi dalam penanganan kasus lumpur Lapindo pada masyarakat terdampak lumpur Lapindo Porong-Sidoarjo Jawa Timur". *Jurnal MODERAT*, 7(3).
- Keputusan Presiden (KEPPRES) nomor 13 tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Di Sidoarjo.
- La'by Joel, LA. 2024. "Pelanggaran HAM Dari Lumpur Lapindo". *Binus.ac.id*. Diakses 18 Mei 2024. <https://binus.ac.id/character-building/2024/03/pelanggaran-ham-dari-bencana-lumpur-lapindo/>
- Latifaturrohan, Tsabita., Junarto, Rohmat. 2023. "Perlindungan, Penegakan dan pemenuhan hak atas tanah korban lumpur Lapindo". *Tunas Agraria*, 6 (1), Hal: 65.
- Lestari, S. E., Djanggih, H. 2019. "Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup". *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2).
- Nafisah, Luthfi Z. 2024. "Pasal 28 UUD 1945 dan Maknanya Untuk Perlindungan HAM". *Detikedu.com*. Diakses 18 Mei 2024.
- Noeswantari, D. 2010. "Kasus Lumpur Lapindo: Hak Asasi Manusia yang Terenggut oleh Kebijakan Publik". *Jurnal Dinamika Ham*, 10(3), Hal: 141-173.
- Oktaviani, Tari., Nailufar, NN. 2023. "Kronologi Lumpur Lapindo". *nasional.kompas.com*. Diakses 18 Mei 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/06/00150071/kronologi-lumpur-lapindo?page=all>
- Online, Hukum. 2022. Pelanggaran HAM: Pengertian, jenis dan Contohnya. *Hukumonline.com*. Diakses 19 Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-ham-lt618d10b275e29/>
- Pusat Data dan Analisa TEMPO. 2019. "Lumpur Lapindo Tragedi Sampai Rehabilitasi Wilayah." Putri, C. A. 2021. "Masalah Lapindo belum beres, Bakrie masih ngutang Rp 2,23 T." *Cnbcindonesia.Com*, 1-2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211122184322-4-293543/masalah-lapindobelum-beres-bakrie-masih-ngutang-rp-223-t>
- Romsan, A., & Isa, SM. 2014. "Corporate responsibility for environmental human rights violation: A case study of Indonesia". *Pertanika Journal of Social Science and Humanities*, 22(January).
- Schiller, J., Lucas, A., & Sulistyanto, P. 2008. "Leraning from the East Java mudflow: Disaster politics in Indonesia." *Indonesia*, 85(April).
- Suryani, N. 2016. "Penegakan hukum pidana lumpur lampindo masih jauh dari harapan". *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), Hal: 75-83.
- Tingay, M. 2016. "What caused the Lusi mudflow disaster in Indonesia?".
- Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat 1 Undang Undang

Republik Indonesia.
Undang Undang Tentang Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2000
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat 2
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat 2 jo Pasal 31 ayat 1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 7
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 ayat 1
dan Pasal 31 ayat 1
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 27 ayat 2 Undang
Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2000
Warsini, N. 2008. "Ganti rugi kepemilikan hak atas tanah masyarakat kabupaten Sidoarjo akibat
pencemaran lingkungan oleh PT. Lapindo Brantas". Jurnal Hukum & Pembangunan, 38(4).